

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja PD atau Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja PD merupakan satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Perubahan Renja PD mempunyai tugas penting dan sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja PD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di unit pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD akan sangat menentukan kualitas pelayanan PD yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan Perubahan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup (a) Tahap perumusan rancangan Perubahan Renja PD dan (b) Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD.

Perumusan rancangan Perubahan Renja PD dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan PD, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II berdasarkan Renstra PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Perubahan Renja PD, Penyempurnaan rancangan Perubahan Renja PD, pembahasan forum PD dan penyesuaian dokumen rancangan perubahan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang – Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2011 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 50 tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur

Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021. Renstra yang berlaku untuk periode lima tahun dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya dengan mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dalam Renja juga diakomodir masukan yang diperoleh dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ketercapaian Visi dan Misi tersebut sangat tergantung pada pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya, yang juga akan berpengaruh pada pencapaian pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara Perubahan Renja dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra, dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja tahun 2019, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan Perubahan RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2019

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap pencapaian target SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) serta solusi dan penyelesaiannya.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Penguraian proses analisis kebutuhan perubahan dan temuan-temuan dari rancangan awal Perubahan RKPD

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan PD.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi renja ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA (Tahun)			REALISASI CAPAIAN (Tahun)		PROYEKSI (Tahun)		Satuan	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2017	2018	2018	2019		
1	2	3	4	6	7	8	9	5	11	12	13	14
1	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	-	-	68,20	68,50	69,80	74,53	67,80	68,20	68,50	Persen	
2	Jumlah Peserta KB Baru yang Dilayani			97.240	97.240	97.240	115.808	97.240	97.240	97.240	Akseptor	
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tersesatkan Penanganannya	-	-	100	100	100	100	100	100	100	Persen	

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan Dalam Pelaksanaan hasil Renja PD Tahun 2019

A. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Hasil pelaksanaan Renja selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur maka hambatan dan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Hambatan/Tantangan

HAMBATAN INTERNAL :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan kualitas SDM belum memadai 2. SOP kegiatan seluruhnya belum tersedia 3. Koordinasi antar Bidang masih belum kuat
HAMBATAN EKSTERNAL :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender 3. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga 4. Masih tingginya rata-rata jumlah anak dalam berkeluarga

Sumber : DPPKBP3A (2018)

Tabel. 2.3
Permasalahan

No	Aspek	Permasalahan
1	Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 3. Masih tingginya perdagangan orang 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender
2	Pembangunan Ketahanan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pembelanjaran peningkatan usaha ekonomi keluarga 2. Masih rendahnya informasi mengenai ketahanan keluarga 3. Masih rendahnya pengembangan potensi remaja 4. Masih Lemahnya layanan informasi keluarga untuk remaja
3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kelahiran 2. Masih rendahnya metode kontrasepsi jangka panjang 3. Masih rendahnya informasi data keluarga 4. Masih rendahnya layanan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK terhadap masyarakat

B. Solusi Permasalahan dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

Tabel. 2.4
Solusi Permasalahan

PERMASALAHAN	TANTANGAN	SOLUSI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 3. Masih tingginya perdagangan orang 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak • Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender 	Adanya upaya-upaya kemitraan dalam rangka mengimplementasikan kegiatan pengarusutamaan gender, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

PERMASALAHAN	TANTANGAN	SOLUSI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pembelanjaran peningkatan usaha ekonomi keluarga 2. Masih rendahnya informasi mengenai ketahanan keluarga 3. Masih rendahnya pengembangan potensi remaja 4. Masih Lemahnya layanan informasi keluarga untuk remaja 	Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan pola kegiatan Tribina, UPPKS dan PIK Remaja / Mahasiswa • Menjalin kerjasama dengan instansi terkait • Optimalisasi integrasi dalam kegiatan Kampung KB
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kelahiran 2. Masih rendahnya metode kontrasepsi jangka panjang 3. Masih rendahnya informasi data keluarga 4. Masih rendahnya layanan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK terhadap masyarakat 	Masih tingginya rata-rata jumlah anak dalam berkeluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan pola kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Sosialisasi program KKBPK dengan memanfaatkan berbagai media sosial, media cetak dan media elektronik • Memberdayakan petugas lini lapangan sampai ke tingkat RT, dimulai dari PKB, TPD, Pos KB, Sub Pos KB, PPL Posyandu, Kader Posyandu dan kelompok KB di tingkat RT • Mengadakan Peningkatan kapasitas petugas lini lapangan berupa pemberian pelatihan mengenai program KKBPK • Mengadakan pelayanan dengan mobil pelayanan (Moyan) • Optimalisasi integrasi dalam kegiatan Kampung KB

Dari tabel hambatan dan masalah serta tantangan dan peluang dapat ditentukan isu-isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah masih rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih tingginya angka kelahiran di tahun 2019.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Sedangkan indikator tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

➤ **Sasaran :**

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak

➤ Indikator Sasaran :

1. Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan Perubahan RKPD. Rancangan Perubahan tidak memenuhi Honorarium Kader Posyandu dan Fasilitas Kegiatan TP. PKK Kabupaten. Sebagaimana tabel berikut :

Rancangan Perubahan RKPD 2018						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga		Terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB	67,80	23.126.074.000,00	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga		Terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB	67,80	23.560.074.000,00	
			Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan	2.857					Terbinanya Institusi Masyarakat Pedesaan		2.857
1.1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab. Cianjur	Terlayannya peserta KB baru	97.240	12.800.000.000,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kab. Cianjur	Terlayannya peserta KB baru	97.240	12.800.000.000,00	
			Tersedianya data keluarga	713992					Tersedianya data keluarga		713992
			Tersedianya data kader Posyandu	8.694					Tersedianya data kader Posyandu		8.694
			Terselurkannya honorarium kader Posyandu	11.783.370,000					Terselurkannya honorarium kader Posyandu		11.783.370,000
			Terlaksanakannya KIE melalui mupen dan radio komunitas	64					Terlaksanakannya KIE melalui mupen dan radio komunitas		64
1.2	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Kab. Cianjur	Terbinanya kader tribina	2249	450.000.000,00	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Kab. Cianjur	Terbinanya kader tribina	2249	884.000.000,00	
			Terfasilitasinya kegiatan TP.PKK	2					Terfasilitasinya kegiatan TP.PKK		2
			Terlatihnya kader UPPKS	409					Terlatihnya kader UPPKS		409
			Terlatihnya anggota PIK R/M	199					Terlatihnya anggota PIK R/M		199
								Tersedianya seragam Kader Dasawisma	6.200		
1.3	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Kab. Cianjur	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana	32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan	8.637.990.000,00	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Kab. Cianjur	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana	32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan	8.637.990.000,00	
1.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK)	Kab. Cianjur	Tersedianya KIE KIT, BK/Kit, Laptop, Obgyn Bed, Pembangunan balai penyuluhan KB, Tk Kec, Rehab gedung balai penyuluhan KB Kec Cianjur, Renovasi/pembangunan sarana MCK Balai Penyuluhan	35 set, 32 set, 10 unit, 10 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit	1.168.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK)	Kab. Cianjur	Tersedianya KIE KIT, BK/Kit, Laptop, Obgyn Bed, Pembangunan balai penyuluhan KB, Tk Kec, Rehab gedung balai penyuluhan KB Kec Cianjur, Renovasi/pembangunan sarana MCK Balai Penyuluhan	35 set, 32 set, 10 unit, 10 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit	1.168.000.000,00	
1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)	Kab. Cianjur	Tersedianya KIE KIT, BK/Kit, Laptop, Obgyn Bed, Pembangunan balai penyuluhan KB, Tk Kec, Rehab gedung balai penyuluhan KB Kec Cianjur, Renovasi/pembangunan sarana MCK Balai Penyuluhan	35 set, 32 set, 10 unit, 10 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit	70.084.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)	Kab. Cianjur	Tersedianya KIE KIT, BK/Kit, Laptop, Obgyn Bed, Pembangunan balai penyuluhan KB, Tk Kec, Rehab gedung balai penyuluhan KB Kec Cianjur, Renovasi/pembangunan sarana MCK Balai Penyuluhan	35 set, 32 set, 10 unit, 10 unit, 1 unit, 1 unit, 4 unit	70.084.000,00	
2	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Cakupan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	450.000.000,00	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Cakupan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	450.000.000,00	
2.1	Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Cianjur	Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	250.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Cianjur	Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	250.000.000,00	
			Pengembangan KLA	3					Pengembangan KLA		3
2.2	Pemberdayaan Perempuan		Terbinanya warga binaan dilokasi P2WKSS	100	200.000.000,00	Pemberdayaan Perempuan		Terbinanya warga binaan dilokasi P2WKSS	100	200.000.000,00	
			Terlaksanakannya rakor gugus tugas TP.PPO	4					Terlaksanakannya rakor gugus tugas TP.PPO		4
			Terlaksanakannya Evaluasi APE PUG	1					Terlaksanakannya Evaluasi APE PUG		1

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2018

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur. Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021, urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang diarahkan kepada 2 (Dua) program yang telah ditetapkan yaitu :

- 1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga**
- 2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Urusan Wajib								
	- Bidang Pengendalian Penduduk dan KB - Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga								
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga	Terbinannya pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB	Kab. Cianjur	67.80%	23,560,074,000.00	APBD		68,20 %	27,939,800,000.00
		Terbinannya Institusi Masyarakat Pedesaan	Kab. Cianjur	2.857				2.860	
	Pembangunan Ketahanan Keluarga	Terbinannya kader tribina	Kab. Cianjur	2249 kader	884,000,000.00	APBD		2249 kader	1,066,000,000.00
		Terlatihnya kader UPPKS	Kab. Cianjur	409 kader				409 kader	
		Terlatihnya anggota PIK R/M	Kab. Cianjur	199 Anggota				292 anggota	
		Terfasilitasinya kegiatan TP.PKK	Kab. Cianjur	2 kegiatan				2 kegiatan	
		Tersedianya Seragam Kader Dasawisma	Kab. Cianjur	6200 Pcs				-	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlayannya peserta KB baru	32 Kecamatan	97.240 akseptor	12,800,000,000.00	APBD		97.240 akseptor	15,500,000,000.00
		Tersediannya up date data keluarga	Kab. Cianjur	713.992 KK				713.992 KK	
		Tersalurkannya honorarium kader Posyandu	32 Kecamatan	Rp 11,766,320,000.00				Rp. 11.783.370.000	
		Terlaksanakannya KIE melalui mupen dan radio komunitas	Kab. Cianjur	64 Kali				64 Kali	
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Jumlah Balai Penyuluhan PPKBP3A yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana	Kab. Cianjur	32 Balai Penyuluhan PPKBP3A Tk. Kecamatan	8,637,990,000.00	DAK		32 Balai Penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan	9,950,000,000

Renja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Tahun 2018

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK)	Tersedianya KIE KIT	Kab. Cianjur	35 Set	1.168.000.000,00	DAK		35 Set	1.343.200.000,00	
				Tersedianya BKB KIT	Kab. Cianjur	32 Set						32 Set
				Tersedianya Laptop	Kab. Cianjur	10 Unit						10 Unit
				Tersedianya Obgyn Bed	Kab. Cianjur	16 Unit						10 Unit
				Tersedianya Balai Penyuluhan Kec. Cianjur	Kab. Cianjur	1 Unit						1 Unit
				Tersedianya Bangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Cugenang	Kab. Cianjur	1 Unit						1 Unit
				Tersediannya sarana MCK Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan	Kab. Cianjur	4 Unit						4 Unit
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)	Tersedianya dokumen pengadaan sarana dan prasarana program KB bagi PKB/PLKB	Kab. Cianjur	10 Dokumen	70.084.000,00	DAK			80.600.000,00	
			Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
			Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kab. Cianjur	100%	450.000.000,00	APBD		100%	1.200.000.000,00	
			Perlindungan Perempuan dan Anak	Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kab. Cianjur	100%	250.000.000,00	APBD		100%	600.000.000,00	
				Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Cianjur	3 jenis						3 jenis
			Pemberdayaan Perempuan	Jumlah warga binaan di lokasi P2WKSS yang dibina	Kab. Cianjur	100 Warga	200.000.000,00	APBD		100 Warga	600.000.000,00	
				Terlaksanakannya rakor gugus tugas TP. PPO	Kab. Cianjur	4 kali						4 kali
				Terlaksanakannya evaluasi APE PUG	Kab. Cianjur	1 kali						1 kali
Jumlah								24.010.074.000,00			29.139.800.000,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Cianjur 2017 – 2021.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan akan lebih mudah untuk dapat mengendalikan Pelaksanaan Pembangunan, Khususnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Akhirnya Kepada semua pihak kami harapkan masukannya demi lancarnya pelaksanaan kerja, dan kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Cianjur, 26 Juni 2019
Plt. KEPALA
DPPKBP3A KABUPATEN CIANJUR

Drs. SAEPUL ANWAR
NIP. 196310301992031004